



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN**

**PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM**



2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

- 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 342 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Pejabat Tinggi Pratama Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019**
- 2. Surat Tugas Melaksanakan tugas sebagai Peneliti pada Hakim Konstitusi dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 342 TAHUN 2019

TENTANG PEMINDAHAN PEJABAT TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2019

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu dengan segera memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) pada jabatan baru sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Memutuskan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEJABAT TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2019.**



- KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) pada jabatan baru sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) dengan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindehan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU berlaku sejak saat pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan.
- KETIGA : Serah terima jabatan dilaksanakan dengan berita acara serah terima jabatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 342 TAHUN 2019

Tanggal: 19 Desember 2019

No.	Nama/NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan/Eselon		Tunjangan Jabatan
				Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Triyono Edy Budhiarto, S.H. NIP. 196112201991031001	Ujung Pandang, 20 Desember 1961	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera Muda II	Panitera Muda I	sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2.	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. NIP. 196406051988031001	Boyolali, 05 Juni 1964	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Panitera Muda II	sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3.	Kurniasih Panti Rahayu, S.E., M.A. NIP. 196705301997032001	Banda Aceh, 30 Mei 1967	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 799/2200/KP.04.00/10/2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, perlu menugaskan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Daftar Terlampir**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peneliti pada Hakim Konstitusi dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Oktober 2020
a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro SDM dan Organisasi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1912500397201007015653

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 799/2200/KP.04.00/10/2020

Tanggal : 13 Oktober 2020

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan Baru	Unit Kerja	TMT
1.	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. NIP. 19890908 201501 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Peneliti Hakim Konstitusi YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020
2.	Mery Christian Putri, S.H., M.H. NIP. 19890424 201801 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Peneliti Hakim Konstitusi YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020
3.	Intan Permata Putri, S.H. NIP. 19910414 201402 2 001	Penata Muda (III/a)	Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020
4.	Muhammad Reza Winata, S.H. NIP. 199205302018011002	Penata Muda (III/a)	Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020

